



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

LAPORAN caLK

TA.2024 BALAI KIPM LAMPUNG

AUDITED





Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung adalah salah satu entitas akuntansi dibawah Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan **Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung** mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kaidah-Kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Bandar Lampung, 6 Mei 2025
Kepala



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Ashari Syarief, S.Pi., M.P
NIP 196905151995031002



Daftar Isi

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Pernyataan Tanggung jawab	iv
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi	20
C. Penjelasan Atas-Pos-pos neraca	27
D. Penjelasan atas pos-pos Laporan Operasional	42
E. Penjelasan atas Perubahan laporan perubahan ekuitas	50
VI. Lampiran dan Daftar	56



Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan
Keamanan Hasil Perikanan Lampung
(032.13.1200.649615.000.KD)

Jl. Soekarno-Hatta No.91 Km 6-7 , Campang Raya,Kec.Sukabumi
Bandar Lampung, 0721-770087

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan **Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung** yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran,Neraca,Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan **Tahun Anggran 2024 (31 Desember)** sebagaimana terlampir,adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai,dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bandar Lampung, 6 Mei 2025
Kepala



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ashari Syarief,S.Pi.,M.P
NIP 196905151995031002

Ringkasan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung Tahunan (31 Desember) TA 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dilingkungan pemerintah. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan Negara pada Posisi Tahun Anggaran 2024 (31 Desember) adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 583.505.000,- atau mencapai 50,74 persen persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp.1.150.000.000

Realisasi Belanja Negara pada Posisi Tahun 2024 (31 Desember) adalah sebesar Rp. 7.099.573.801,- atau mencapai 97,27 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 7.298.494.000,-

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada Posisi 31 Desember 2023. Nilai Aset per Posisi Tahun Anggaran 2024 (31 Desember) dicatat dan disajikan sebesar Rp.19.306.082.190,- yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp. 51.326.254,-; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp.19.254.755.936,- dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp.32.847.566,- dan Rp.19.273.234.624,-

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan Posisi **Tahun Anggaran 2024 (31 Desember)** adalah sebesar **Rp.575.765.000,-** sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar **Rp. 7.826.309.041,-** sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai **Rp(7.250.544.041)**. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar 0,- dan **Rp.(7.250.544.041),-** sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar **Rp(7.250.544.041),-**

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2024 adalah sebesar **Rp. 21.636.327.374,-** dikurangi Defisit-LO sebesar **Rp(7.250.544.041),-** ditambah dengan koreksi-koreksi senilai **Rp.38.700,-** dan Transaksi Antar Entitas sebesar **Rp.4.887.412.591,-** sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai **Rp. 19.273.234.624,-**

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal **31 Desember 2024**, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas sedangkan Neraca, laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk 31 Desember 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Laporan Realisasi Anggaran

**BALAI KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN LAMPUNG**
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE 31 Desember 2024 DAN 31 Desember 2023

(Dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-Dec-24		% thd Angg	31-Dec-23
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	1.150.000.000	583.505.000	50,74	1.429.529.405
JUMLAH PENDAPATAN		1.150.000.000	583.505.000	50,74	1.429.529.405
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	4.578.669.000	4.524.009.463	98,81	6.517.153.037
Belanja Barang	B.4	2.719.825.000	2.575.564.338	94,70	4.394.480.188
Belanja Modal	B.5			0,00	802.781.000
Belanja Bantuan Sosial	B.6		-	0	-
JUMLAH BELANJA		7.298.494.000	7.099.573.801	97,27	11.714.414.225

Neraca

BALAI KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN LAMPUNG

NERACA

PERIODE 31 Desember 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

URAIAN	CATATAN	31-Dec-24	2023
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Belanja Dibayar dimuka	C.3	7.500.000	7.500.000
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	-	-
Piutang Bukan Pajak (Netto)	C.8	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	-	-
Persediaan	C.10	43.826.254	132.975.801
Jumlah Aset Lancar		51.326.254	140.475.801
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.14	9.349.011.000	10.143.396.960
Peralatan dan Mesin	C.15	8.184.366.928	9.248.347.533
Gedung dan Bangunan	C.16	10.509.425.550	11.495.926.700
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.18	-	15.833.350
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	(8.788.047.542)	(8.994.817.664)
Jumlah Aset Tetap		19.254.755.936	21.908.686.879
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.21	-	-
Aset Lain-Lain	C.22	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	-	-
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		19.306.082.190	22.049.162.680
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	32.847.566	44.383.174
Utang yang belum ditagihkan	C.26	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.27	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		32.847.566	44.383.174
JUMLAH KEWAJIBAN		32.847.566	44.383.174
EKUITAS			
Ekuitas	C.28	19.273.234.624	21.636.327.374
JUMLAH EKUITAS		19.273.234.624	21.636.327.374
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		19.306.082.190	21.680.710.548

Laporan Operasional

BALAI KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN LAMPUNG
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

URAIAN	CATATAN	31-Dec-24	31-Dec-23
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	575.765.000	1.421.320.000
JUMLAH PENDAPATAN		575.765.000	1.421.320.000
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	4.522.583.463	6.507.933.037
Beban Persediaan	D.3	175.871.689	339.362.172
Beban Barang dan Jasa	D.4	1.391.396.058	2.408.589.411
Beban Pemeliharaan	D.5	500.610.288	548.797.256
Beban Perjalanan Dinas	D.6	597.303.757	1.065.099.699
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	638.543.786	782.594.577
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	12.600
JUMLAH BEBAN		7.826.309.041	11.652.388.752
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		7.250.544.041	10.231.068.752
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non lancar			4.231.055
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar			(6.205.555)
Beban Pelepasan Aset Non Lanar			(1.974.500)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
Surplus /Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	(4.201.300)
Pendapatan Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	(2.003.850)
Beban Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	(6.205.150)
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-	29.755
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		7.250.544.041	10.231.068.752
POS LUAR BIASA	D.12		
Pendapatan PNPB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		7.250.544.041	10.231.068.752

**BALAI KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN LAMPUNG**
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

URAIAN	CATATAN	31-Dec-24	31-Dec-23
EKUITAS AWAL	E.1	21.636.327.374	21.568.263.551
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(7.250.544.041)	(10.231.038.997)
			5.193.900
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	38.700	
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	-	
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	-	
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	38.700	5.193.900
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS		4.887.412.591	10.293.908.920
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.4	(2.363.092.750)	68.063.823
EKUITAS AKHIR	E.5	19.273.234.624	21.636.327.374

Catatan Atas Laporan Keuangan

Dasar Hukum
entitas dan
rencana
strategis

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Balai Karantina Ikan

Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung

Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung

didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan No. 2005/BALAP.071/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Entitas berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta No.91 KM 6-7 Campang Raya Bandar Lampung.

Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung

mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung didirikan sebagai salah satu bagian integral dari Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan mempunyai peranan yang strategis dalam pengembangan dan penyelamatan usaha perikanan di Indonesia, Upaya perlindungan sumberdaya ikan di Indonesia dari ancaman Hama Penyakit Ikan berbahaya dilakukan melalui kegiatan tindakan karantina ikan terhadap media pembawa hama penyakit ikan di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran di seluruh Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : PER.25/MEN/2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan.

Untuk mewujudkan tujuan diatas Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung berkomitmen dengan :

MOTTO :

Balai KIPM Lampung yaitu : **OKE SIP** “ Objektif,Kridibel,Efesien, Sinergi, dan Profesional”

Untuk mewujudkan tujuan diatas Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung berkomitmen dengan :

VISI:

“Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional”.

MISI :

“Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang undangan kepada KKP dan penjabaran dari misi pembangunan nasional, maka terdapat 3 pilar yang menjadi misi KKP yakni:

1. **Kedaulatan (Sovereignty)**, yakni mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. **Keberlanjutan (Sustainability)**, yakni mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan;
3. **Kesejahteraan (Prosperity)**, yakni mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan.

TUJUAN :

Menjabarkan misi pembangunan kelautan dan perikanan, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah :

Kedaulatan (Sovereignty), yakni :

1. Meningkatkan pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan;
2. Mengembangkan sistem perkarantina ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan

Keberlanjutan (Sustainability), yakni :

1. Mengoptimalkan pengelolaan ruang laut, konservasi dan keanekaragaman hayati laut ;
2. Meningkatkan keberlanjutan usaha perikanan tangkap dan budidaya

3. Meningkatkan daya saing dan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan.

Kesejahteraan (*Prosperity*), yakni :

1. Mengembangkan kapasitas SDM dan pemberdayaan masyarakat
2. Mengembangkan inovasi iptek kelautan dan perikanan

Kebijakan Mutu Integritas Balai KIPM Lampung

Menjamin Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil perikanan melalui :

1. Memberikan pelayanan,berkomitmen patuh terhadap Sistem manajemen integritas sesuai ruang lingkup yang diterapkan dan secara berkelanjutan meningkatkan efektifitas penerapannya;
2. Berkomitmen dalam melaksanakan pelayanan sertifikasi, inspeksi dan pengujian dengan menerapkan Sistem Manajemen Integritas;
3. Balai KIPM Lampung sebagai lembaga Inspeksi berkomitmen meminimalisir kasus penolakan ekspor di negara mitra;
4. Semua personil memahami dan menerapkan sistem manajemen integritas.

Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung

Mempunyai ASN sebanyak 42 (Empat Puluh Dua), meliputi : Kepala UPT, Kaur Tata Usaha, Katimja Pengawasan, Katimja Pengendalian, Katimja Penerapan standar dan Metode Uji, Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum,serta PPPK sebanyak 1 Orang, PPNP (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negari) sebanyak 7 Orang dan PJLP sebanyak 5 Orang.

Pendekatan
Penyusunan
Laporan Keuangan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Periode **Tahun Anggaran 2024 (31 Desember)** ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh **Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung**. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAIBA dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar Pengukuran***A.4. Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan **Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung** dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan Akuntansi
Aset***A.5. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Periode **Tahun Anggaram 2024 (31 Desember)** telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor **Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung**. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor **Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung** adalah sebagai berikut:



(1) Pendapatan- LRA

Pendapatan-LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Belanja***(3) Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

*Beban***(4) Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

*Aset***(5) Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

*Aset Lancar***a. Aset Lancar**

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah

BI pada tanggal neraca.

- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

*Aset Tetap***b. Aset Tetap**

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal

Kekayaan negara, Kementerian keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain tanah.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Nilai aset Tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal ini nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset
Tetap

c. **Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka
Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

a. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10

Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal sebanyak 15 Kali Revisi.

Rekapitulasi Revisi DIPA Selama TA 2024:

No	Uraian	Tanggal Revisi	Alasan Revisi
1	Data Awal	15 November 2023	-
2	Revisi Ke-1	15 Januari 2024	Revisi Halaman III DIPA
3	Revisi Ke-2	25 Januari 2024	Revisi Halaman III DIPA
4	Revisi Ke-3	5 April 2024	Revisi Halaman III DIPA
5	Revisi Ke-4	23 April 2024	Revisi Halaman III DIPA
6	Revisi Ke-5	7 Juni 2024	Revisi Halaman III DIPA
7	Revisi Ke-6	24 Juli 2024	Revisi Halaman III DIPA
8	Revisi Ke-7	25 Juli 2024	Revisi Halaman III DIPA
9	Revisi Ke-8	2 September 2024	Revisi Halaman III DIPA
10	Revisi Ke-9	15 Oktober 2024	Revisi Halaman III DIPA
11	Revisi Ke-10	6 November 2024	Revisi Halaman III DIPA
12	Revisi Ke-11	18 November 2024	Revisi Halaman III DIPA
13	Revisi Ke-12	19 November 2024	Revisi Halaman III DIPA
14	Revisi Ke-13	9 Desember 2024	Revisi Halaman III DIPA
15	Revisi Ke-14	10 Desember 2024	Revisi Halaman III DIPA
16	Revisi Ke-15	17 Desember 2024	Revisi Halaman III DIPA

Uraian	31-Dec-24	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	1.150.000.000	1.150.000.000
Pendapatan Lain-lain	0	-
Jumlah Pendapatan	1.150.000.000	1.150.000.000
Belanja		
Belanja Pegawai	6.833.243.000	4.578.669.000
Belanja Barang	4.761.666.000	2.719.825.000
Belanja Modal	0	0
Belanja Bantuan Sosial	0	-
Jumlah Belanja	11.594.909.000	7.298.494.000

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada Tahun Anggaran 2024 (31 Desember) adalah sebesar **Rp 583.505.000,-** atau mencapai 50,74 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar **Rp 1.150.000.000,-** Pendapatan Kantor Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung terdiri dari Pendapatan Jasa dan Pendapatan Lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	31 Desember 2024		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Jasa	1.150.000.000	583.505.000	50,74
Penerimaan Belanja Pegawai TA lalu		-	
Pendapatan dan Pemindahtanganan BMN Lainnya		-	
Jasa Giro		-	
Pendaapatan TGR TA lalu	-	-	-
Jumlah	1.150.000.000	583.505.000	50,74

Realisasi Pendapatan Jasa Periode **Tahun Anggaran 2024 (31 Desember)** mengalami Penurunan 59,18 persen dibandingkan TA 2023. Hal ini disebabkan adanya penurunan penerimaan karena PP nomor 85 tahun 2021 tentang jenis dan tarif atas penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan adanya komoditi yang tidak dikenakan PNBPN dari pelayanan (jasa) Sensor Karantina dan Pemeriksaan/Pengawasan yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Kantor Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung dan Permen KP no.35 Tahun 2021 tentang Besaran, Persyaratan dan Tata cara Pengenaan Tarif Sampai Nol Rupiah atau Nol Persen atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada Periode **Tahun Anggaran 2024 (31 Desember)** terdapat Realisasi Pendapatan sebesar **Rp. 583.505.000,-** dari Pendapatan Sensor Karantina, Pengawasan / Pemeriksaan (425332) dan Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi lainnya (425289). Pendapatan dari pemindahtanganan BMN sebesar Rp. 0. serta Pendapatan dari Belanja Pegawai Tahun anggaran yang lalu sebesar Rp 0 .

Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023

URAIAN	REALISASI 31 Des 2024	REALISASI 31 Des 2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa	583.505.000	1.429.529.405	-59,18
Pendapatan dari pemindahtanganan BMN	-	-	
Pendapatan Belanja TAYL	-	-	
Jumlah	583.505.000	1.429.529.405	-59,18

B.2. Belanja

Realisasi Belanja
Negara Rp.
7.099.573.801,-

Realisasi Belanja instansi pada 31 Desember 2024 adalah sebesar **Rp. 7.099.573.801,-** atau **97,27%** dari anggaran belanja sebesar **Rp. 7.298.494.000,-** Rincian anggaran dan realisasi belanja 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Periode 31 Desember 2024

Uraian	31/12/2024		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	4.578.669.000	4.524.009.463	98,81
Belanja Barang	2.719.825.000	2.575.564.338	94,70
Belanja Modal	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Total Belanja Kotor	7.298.494.000	7.099.573.801	97,27
Pengembalian	-	-	-
Jumlah	7.298.494.000	7.099.573.801	97,27

Dibandingkan dengan 31 Desember 2023, Realisasi Belanja periode 31 Desember 2024 mengalami mengalami penurunan sebesar 39,39% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain :

1. Belanja Pegawai mengalami penurunan karena adanya pengurangan jumlah pegawai
2. Belanja barang mengalami penurunan
3. Tidak adanya Belanja Modal tahun 2024

Perbandingan Realialisasi Belanja 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN	REALISASI 31 Desember 2024	REALISASI 31 Desember 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	4.524.009.463	6.517.153.037	(30,58)
Belanja Barang	2.575.564.338	4.394.480.188	(41,39)
Belanja Modal	-	802.781.000	100,00
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	7.099.573.801	11.714.414.225	(39,39)

Belanja Pegawai Rp.

4.524.009.463,-

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 4.524.009.463,- dan Rp. 6.517.153.037,-. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi belanja 31 Desember 2024 mengalami Penurunan sebesar 30,58 persen dari 31 Desember 2023. Hal ini disebabkan Belanja pegawai turun dikarenakan adanya pengurangan jumlah pegawai

Perbandingan Belanja Pegawai 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN	REALISASI 31 desember 2024	REALISASI 31 Desember 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS dan PPPK	2.094.144.958	2.997.433.724	(30,14)
Belanja uang makan PNS dan PPPK	213.917.000	357.994.000	(40,25)
Belanja Lembur PNS dan PPPK	174.021.000	169.129.000	2,89
Belanja Tunjangan Kinerja PNS dan PPPK	2.041.926.505	2.992.596.313	(31,77)
Jumlah Belanja Kotor	4.524.009.463	6.517.153.037	(30,58)
Pengembalian Belanja Pegawai	-	-	-
Jumlah Belanja	4.524.009.463	6.517.153.037	(30,58)

Belanja Barang Rp

2.575.564.338,-

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.2.575.564.338,- dan Rp. 4.394.480.188,- Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2024 mengalami penurunan 41,39 % dari Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2023. Hal ini antara lain disebabkan turunnya kegiatan belanja barang persediaan, barang non operasional, belanja operasional, pemeliharaan, belanja jasa dan belanja perjalanan dalam negeri.

Perbandingan Belanja Barang 31 Desember 2024 Dan 31 Desember 2023

URAIAN	REALISASI 31 Desember 2024	REALISASI 31 Desember 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Jasa	686.081.956	666.299.205	2,97
Belanja Pemeliharaan	487.848.063	508.459.576	(4,05)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	597.303.757	1.065.099.699	(43,92)
Belanja Barang Persediaan bahan Baku dan Konsumsi	88.906.852	412.515.328	(78,45)
Belanja Operasional	566.751.960	911.947.330	100,00
Belanja Non Operasional	148.671.750	830.159.050	100,00
Jumlah Belanja Kotor	2.575.564.338	4.394.480.188	(41,39)
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	2.575.564.338	4.394.480.188	(41,39)

Belanja Modal Rp. 0,-

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp. 802.781.000,- Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada 31 Desember 2024 mengalami penurunan 100,00 persen dibandingkan TA 2023, karena belum adanya realisasi belanja modal pada posisi 31 Desember 2024 ini dibandingkan dengan periode TA 2023.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal 30 Desember 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI 31 Desember 2024	REALISASI 31 Desember 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	802.781.000	(100,00)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0,00
Belanja Modal Lainnya	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	802.781.000	-100,00
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	0	802.781.000	-100,00

Belanja Modal Tanah

Rp.0,-

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah 31 Desember 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Tidak Terdapat realisasi belanja modal tanah periode 31 Desember 2024.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI 31 Desember 2024	REALISASI 31 desember 2023	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	0,00

Belanja Modal
Peralatan dan Mesin
Rp.0,-

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31 Desember 2024 dan TA. 2023 adalah sebesar Rp. 0,-, dan Rp. 802.781.000,- terjadi penurunan sebesar 100,00% untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin dibandingkan dengan TA 2023.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Periode 31 desember 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI 31 Desember 2024	REALISASI 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Alat Angkutan Darat Bermotor	0	0	0,00
Alat Ukur	0	0	0,00
Alat Kantor	0	0	0,00
Alat Rumah Tangga	0	0	0,00
Alat Studio	0	0	0,00
Peralatan Pemancar	0	0	0,00
Unit Alat Laboratorium	0	802.781.000	-100,00
Alat Komunikasi	0	0	0,00
Alat Kedokteran	0	0	0,00
Komputer Unit	0	0	0,00
Peralatan Komputer	0	0	0,00
Alat Peraga Pelatihan	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	802.781.000	-100,00
Pengembalian	0	0	0,00
Jumlah Belanja Bersih	0	802.781.000	-100,00

Belanja Modal Gedung
dan Bangunan
Rp. 0

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0,- Tidak ada Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Periode Laporan 31 Desember 2024.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan
Periode 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI 31 Desember 2024	REALISASI 31 Desember 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan Berupa Renovasi Atap Gedung	0	0	0,00
	0		0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-

Belanja Modal
Jalan, Irigasi dan
Jaringan Rp. 0

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan 31 Desember 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak ada Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Periode Laporan 31 Desember 2024 ini

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Periode 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI 31 Desember 2024	REALISAS 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Belanja Modal Jaringan, Pemasangan Tambah Daya Listrik	0	0	0,00
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	0,00

Belanja Modal lainnya
Rp. 0

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya 31 Desember 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Tidak ada Realisasi Belanja Modal Lainnya pada Periode Laporan 31 Desember 2024 ini.

Belanja Bantuan Sosial
Rp0

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Tidak ada Realisasi Belanja bantuan Sosial pada Pelaporan Periode 31 Desember 2024 ini.

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Periode
31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI 31 Desember 2024	REALISASI 31 Desember 2023	NAIK (TURUN) %
Kelompok Pendidikan Jaya Maju	0	0	0,00
Kelompok Pendidikan Cenderawasih	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	0,00

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara
Pengeluaran Rp.0

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Keterangan	31 Desember 2024	31-Dec-23
Uang Tunai	-	-
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
Jumlah	-	-

Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp0

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar masing-masing Rp.0 dan Rp. 0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

Keterangan	31-Dec-24	31-Dec-23
Pendapatan Jasa (Sensor/Karantina Ikan)	-	-
Pedapatan dari pemindahtanganan BMN	-	-
penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun anggaran yang lalu	-	-
penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun anggaran yang lalu	-	-
Jumlah	-	-

Kas Lainnya dan Setara
Kas Rp.0

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

Keterangan	31 Jdesemeber 2024	TH 2023
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	-	-
Jumlah	-	-

Untuk Periode 31 Desember 2024 Balai KIPM Lampung tidak terdapat Kas Lainnya dan Setara Kas senilai **Rp. 0**

Piutang Bukan Pajak
Rp. 0

C.4 Piutang PNB

Saldo Piutang PNB per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-

Rincian Piutang Bukan Pajak

Uraian	31-Dec-24	TA 2023
Piutang PNB	-	-
Piutang Lainnya	-	-
Jumlah	-	-

Bagian Lancar Tagihan
TP/TGR
Rp0.00

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi periode 31 Desember 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang. Rincian Bagian Lancar TP/TGR adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TP/TGR

No	Nama	31-Dec-24	Tahun 2023
1		-	-
2		-	-
3		-	-
4		-	-
5		-	-
6		0	0
Jumlah		-	-

Bagian Lancar TPA
Rp.0,00

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) periode 31 Desember 2024 dan TA 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp. 0,-. Bagian Lancar TPA merupakan TPA yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TPA

No	Nama	31-Dec-24	TA 2023
1		-	-
2		-	-
3		-	-
4		-	-
5		-	-
Jumlah		-	-

Penyisihan Piutang Tak
Tertagih – Piutang
Bukan Pajak
Rp 0

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek periode 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.(38.700),-

Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Bukan Pajak adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang bukan pajak yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-piutang bukan pajak pada

tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Bukan Pajak	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-	0,50%	-
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-	0,00%	-
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-	0,00%	-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-	-	-

Belanja Dibayar di Muka

Rp 7.500.000,-

C.8 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka periode 31 Desember 2024 dan TA 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.7.500.000,- dan Rp.7.500.000,-. Belanja Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

Rincian Belanja Dibayar di Muka

Jenis	31-Dec-24	TA 2023
Pembayaran Internet	-	-
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin	-	-
Pembayaran Sewa Gudang Arsip	7.500.000	7.500.000
Jumlah	7.500.000	7.500.000

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima periode 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-

Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut:

Persediaan

Rp. 43.826.254,-

C.10 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 43.826.254,- dan Rp. 132.975.801,-. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan

per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan

Persediaan	31-Dec-24	2023
Barang Konsumsi	22.547.554	98.934.876
Barang untuk Pemeliharaan		
Suku Cadang	21.278.700	
Pita Cukai, Materai dan Leges		
Bahan Baku	-	34.040.925
Jumlah	43.826.254	132.975.801

Saldo Persediaan pada Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung per 31 Desember 2024 sebesar **Rp. 43.826.254,-** (Empat Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Empat Rupiah), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 132.975.801,- (Seratus Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Satu Rupiah) total persediaan selama periode laporan sebesar Rp. 89.149.547,- (Delapan Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah). Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

Akun	Uraian	Saldo Awal (Rp)	Mutasi (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
117111	Barang Konsumsi	98.934.876	76.387.322	22.547.554
117112	Amunisi			-
117113	Bahan Untuk Pemeliharaan	-		-
117114	Suku Cadang	34.040.925	12.762.225	21.278.700
117121	Pita Cukai, Materai dan Legas			-
117124	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat			-
117125	Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat			-
117126	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat			-
117131	Bahan Baku			
117191	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga			-
117199	Persediaan Lainnya	-		-
TOTAL		132.975.801	89.149.547	43.826.254

Nilai persediaan yang disajikan dalam neraca merupakan nilai berdasarkan opname fisik sesuai dengan Berita Acara Opname Fisik Persediaan Nomor: B.1890/BKIPM.LPG/PL.820/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024 dengan nilai sebesar Rp.43.826.254,- (*Empat Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Empat Rupiah*),

Balai KIPM Lampung tidak memiliki barang persediaan dalam kondisi rusak sampai dengan akhir periode Semester II TA.2024 per 31 Desember 2024.

Pencatatan Bahan Laboratorium

Pencatatan Bahan Laboratorium pada Aplikasi Persediaan menggunakan satuan kemasan sedangkan di Laboratorium Balai KIPM Lampung pemakaian bahan laboratorium menggunakan satuan volume bahan laboratorium. Sehingga pencatatan di aplikasi persediaan dan laboratorium memiliki perbedaan. Stock opname Bahan Laboratorium telah dilaksanakan dan dicatat sesuai dengan sisa yang ada di eseha bahan laboratorium Balai KIPM Lampung.

Pencatatan Sertifikat HC

Balai KIPM Lampung telah melakukan pencatatan health sertificate (HC) dengan satuan eksemplar dan setiap sertifikat esehatan yang telah diterima oleh Balai KIPM Lampung baik dari UPT Pusat maupun kantor daerah lingkup BKIPM telah tercatat di aplikasi persediaan.

Tagihan TP/TGR
Rp0

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) periode 31 Desember 2024 dan TA 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.00. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) periode 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Tagihan TP/TGR

No	Debitur	TA 2024	TA 2023
1		-	-
		0	0
Jumlah		-	-

TPA
Rp0.00

C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) periode 31 Desember 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0.00 dan Rp0.00. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Tagihan PA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Tagihan TP/TGR

No	Debitur	TA 2024	TA 2023
1			
2			
3			
4			
5		-	-
Jumlah		-	-

Penyisihan Piutang Tak
Tertagih – Piutang
Jangka Panjang
Rp0,00

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang periode 31 Desember 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,-. Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing

piutang TPA.

Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Jangka Panjang untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Jangka Panjang

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-	0,00%	-
Tagihan PA			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-	0,00%	-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-	-	-

Tanah

Rp. 9.349.011.000

C.14 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Balai KIPM Lampung periode 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp. 9.349.011.000,- dan Rp10.143.396.960,- tidak Terdapat Realisasi pada periode 31 Desember 2024, Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	10.143.396.960
Mutasi tambah:	0
Pengurukan dan Pematangan Tanah	794.385.960
Mutasi kurang:	
Selisih Revaluasi aset	-
Transfer Keluar	794.385.960
Penyitaan pengadilan	0
Saldo per 31 Desember 2024	9.349.011.000

Peralatan dan Mesin

Rp. 8.184.366.928,-

C.15 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin periode 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp.8.184.366.928,- dan Rp.9.248.347.533,- Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	9.248.347.533
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Hibah Barang	0
Transfer Masuk	0
Koreksi tambah	0
Mutasi kurang:	0
Transfer Keluar	1.063.980.605
Saldo per 31 Desember 2024	8.184.366.928
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	7.022.209.242
Nilai Buku per 31 Desember 2024	1.162.157.686

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin berupa:

Mutasi Tambah :

Tidak ada Mutasi Tambah pada periode 31 Desember 2024

Mutasi Kurang :

- Adanya Tranfer Keluar Peralatan dan Mesin ke BKHIT Lampung

Gedung dan Bangunan
Rp 10.509.425.550,-

C.16. Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan periode 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp.10.509.425.550 dan Rp.11.495.926.700,- Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada anggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	11.495.926.700
Mutasi tambah:	
Pengembangan Langsung Berupa Renovasi Atap Gedung Bangunan	-
Koreksi Pencatatan Nilai	-
Mutasi Kurang:	
Transfer Keluar	986.501.150
Saldo per 31 Desember 2024	10.509.425.550
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	1.765.838.300
Nilai Buku per 31 Desember 2024	8.743.587.250

Mutasi Tambah :

- Mutasi Tambah pada periode 31 Desember 2024 senilai Rp (0)

Mutasi Kurang :

- Mutasi Kurang pada periode 31 Desember 2024 senilai Rp (986.501.150),-



Jalan, Jaringan dan
Irigasi Rp 0

C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan periode 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp..0 Pada periode 31 Desember 2024 Tidak ada Transaksi penambahan Jalan,Irigasi dan Jaringan pada periode 31 Desember 2024 ,Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	-
Mutasi tambah:	
Selisih Revaluasi Aset	-
Koreksi Pencatatan Hasil penilaian kembali	-
Saldo per 31 Desember 2024	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	
Nilai Buku per 31 Desember 2024	-

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tetap Lainnya
Rp. 0,-

C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah,peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan.Saldo Aset Tetap Lainnya periode 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp. 0,- dan Rp15.833.350 Aset tetap tersebut berupa Buku-buku perpustakaan. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini untuk periode 31 Desember 2024 . Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	15.833.350
Mutasi tambah:	
-	0
Mutasi kurang:	
- Transfer Keluar	15.833.350
Saldo per 31 Desember 2024	0
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2024	0
Nilai Buku per 31 Desember 2024	0

Konstruksi Dalam
Pengerjaan
Rp. 0,-

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan periode 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp0.

Akumulasi
Penyusutan Aset Tetap
Rp. (8.788.047.542),-

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap periode 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing Rp. (8.788.047.542),- dan Rp. (9.370.971.096). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap periode 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	8.184.366.928	7.022.209.242	1.162.157.686
2	Gedung dan Bangunan	10.509.425.550	1.765.838.300	8.743.587.250
3	Tanah	9.349.011.000	0	9.349.011.000
4	Aset Tetap Lainnya		0	0
Akumulasi Penyusutan		28.042.803.478	8.788.047.542	19.254.755.936

Aset Tak Berwujud
Rp0,00

C.21 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) periode 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp.0,- dan Rp.0,-

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Balai KIPM Lampung tidak mempunyai Aset Tak Berwujud pada Kantor Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	-
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2024	-
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2024	-
Nilai Buku per 31 Desember 2024	-

Rincian Aset Tak Berwujud periode 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tak berwujud

Uraian	Nilai
	0
	0
Jumlah	0

Aset Lain-Lain Rp. 0

C.22 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain periode 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp.0 dan Rp0. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023	-
Mutasi tambah:	
- reklasifikasi dari aset tetap	-
Mutasi kurang:	
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan	-
- penghapusan BMN	-
Saldo per 31 Desember 2024	-
Akumulasi Penyusutan	
Nilai Buku per 31 Desember 2024	-

Akumulasi Penyusutan
dan Amortisasi Aset
Lainnya Rp

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya periode 31 desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing Rp0 dan Rp0 .Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya periode 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud	0	0	0
Aset Lain-lain	0	0	0
Jumlah	0	0	0

Uang Muka dari KPPN
Rp.0,-

C.24 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kejadian masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang kepada Pihak
Ketiga
Rp 32.847.566,-

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

1. Nilai Utang kepada Pihak Ketiga periode 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp.32.847.566,- dan Rp.44.383.174, Utang kepada Pihak Ketiga (berupa belanja Langganan listrik, telepon, air dan internet) merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Kantor Balai KIPM Lampung per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Utang Kepada Pihak Ketiga sebesar Rp.32.847.566,- Terdiri dari

- Belanja Pegawai PNS Berupa Uang Makan Bulan Desember 2024 sebesar Rp, 16.078.000,-.
- Belanja Langganan Listrik Bulan Desember 2024 sebesar Rp.15.794.616,-
- Belanja Langganan Telepon Bulan Desember 2024 sebesar Rp. 382.950.
- Belanja Pegawai PPPK Berupa Uang Makan Bulan Desember 2024 sebesar Rp, 592.000,-.

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Belanja Langganan Listrik yang Masih Harus Dibayar	15.794.616	
Belanja Langganan Telepon yang Masih Harus Dibayar	382.950	
Belanja Pegawai PNS yang Masih Harus Dibayar	16.078.000	
Belanja Pegawai PPPK yang Masih Harus Dibayar	592.000	
Total	32.847.566	

C.26 Pendapatan yang Ditangguhkan

Pendapatan yang
ditangguhkan
Rp0.00

Nilai Pendapatan Ditangguhkan periode 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Pendapatan yang Ditangguhkan merupakan pendapatan negara yang belum disetorkan ke Kas Negara pada tanggal pelaporan. Pendapatan tersebut merupakan pendapatan PNBP, pengembalian belanja, serta pungutan/potong pajak yang belum disetorkan ke kas negara pada periode TA Pendapatan yang Ditangguhkan pada Kantor Balai KIPM Lampung per tanggal pelaporan disajikan sebagai berikut:

Rincian Pendapatan yang Ditangguhkan

Uraian	Jumlah
Pendapatan PNB	-
PPH yang belum disetor	-
Total	-

Pendapatan Diterima di
Muka
Rp0.00

C.27 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka periode 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp0,- dan Rp0,- Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun. Rincian Pendapatan Diterima di Muka dari pihak ketiga disajikan sebagai berikut:

Rincian Pendapatan diterima di muka

Uraian	Jumlah
Total	-

C.28 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang masih
harus dibayar
Rp.32.847.566,-

Beban yang Masih Harus Dibayar periode 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp.32.847.566,- dan Rp. 44.383.174,- merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga berupa Tagihan Listrik, PDAM, Telp dan Lagganan Internet Speedy, yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	31-Dec-24	Tahun 2023
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	16.670.000	-
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	16.177.566	-
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	0	-
Jumlah	32.847.566	-

Ekuitas

Rp.19.273.234.624,-

C. Ekuitas

Ekuitas periode 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 19.273.234.624,- dan Rp.21.636.327.374,- . Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan

PNBP

Rp. 575.765.000

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada periode 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp. 575.765.000,- dan Rp. 1.429.529.405,- Pendapatan tersebut terdiri dari:

*Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
periode 31 Desember 2024 dan 2023*

URAIAN	31 Desember 2024	2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa	575.765.000	1.421.320.000	40,5
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		6.205.555	-100,0
Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin		-	-
Penerimaan belanja pegawai tahun anggaran yang lalu		162.350	(100,00)
Penerimaan belanja barang tahun anggaran yang lalu		1.841.500	(100,00)
Jumlah	575.765.000	1.429.529.405	40,3

Pendapatan Jasa merupakan Pendapatan-LO yang diperoleh dari Pendapatan/Jasa Sensor Sertifikasi Mutu senilai Rp. 575.765.000,-,Pendapatan dari Pelepasan Aset Non Lancar Rp. 0,- Penerimaan Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang lalu Rp. 0,- dan Penerimaan Belanja Barang Tahun Anggaran yang lalu Rp. 0,-

Beban Pegawai

Rp 4.522.583.463

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada periode 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 4.522.583.463,- dan Rp.6.507.933.037,- Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS

sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai periode 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2024	2023	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji	1.647.539.900	2.336.994.300	70
Beban Tunjangan-Tunjangan	446.581.005	651.184.058	69
Beban Uang Makan	218.895.000	357.994.000	61
Beban Pembulatan Gaji PNS	24.053	35.366	68
Beban Tunjangan Kinerja	2.041.926.505	2.992.596.313	68
Uang Lembur	167.617.000	169.129.000	99
Jumlah	4.522.583.463	6.507.933.037	69

Beban

*Persediaan Rp.
175.871.689,-*

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada periode 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.175.871.689,- dan Rp. 339.362.172,- Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan periode 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2024	2023	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	175.871.689	130.642.072	25,72
Beban Persediaan pita cukai, materai dan leges			
Beban Bahan Baku		208.720.100	(100,00)
Beban Persediaan Suku Cadang			
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan			
Jumlah Beban Persediaan	175.871.689	339.362.172	(92,96)

Beban Barang
dan Jasa
Rp.1.391.396.058
-

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa periode 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.1.391.396.058,- dan Rp 2.408.589.411,- Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk periode 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa posisi periode 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2024	2023	NAIK (TURUN) %
Beban Langganan Daya dan Jasa	273.772.348	304.113.031	-9,98
Beban Sewa	75.950.000	205.270.000	-63,00
Beban Jasa Profesi	1.300.000	82.800.000	-98,43
Beban Jasa Lainnya	324.950.000	74.300.000	337,35
Beban Barang dan Jasa			0,00
Beban bahan	54.021.750	711.796.050	0,00
Beban Honor Output Kegiatan	4.896.000	8.160.000	-40,00
Beban barang Non Operasional lainnya	89.754.000	110.203.000	-18,56
Beban Keperluan Perkantoran	460.609.308	643.630.000	-28,44
beban penambah Daya tahan tubuh	20.919.152	61.431.330	100,00
Beban Pengiriman surat dinas pos surat			0,00
beban Honor operasional satker	78.623.500	196.786.000	-60,05
beban barang operasional lainnya	6.600.000	10.100.000	-34,65
Beban Perjalanan Dinas			
Jumlah	1.391.396.058	2.408.589.411	-42,23

Beban
Pemeliharaan Rp.
500.610.288,-

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan periode 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 500.610.288,- dan Rp.548.797.256- Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan Periode 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2024	2023	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	88.919.500	195.245.000	-54,46
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	394.278.563	308.584.575	27,77
Beban persediaan untuk Barang konsumsi			0,00
Beban persediaan Suku Cadang	12.762.225	30.372.145	-57,98
Beban Persediaan Bahan Pemeliharaan		9.965.535	-100,00
Beban Pemeliharaan jalan dan jembatan	4.650.000	4.630.000	0,43
Jumlah	500.610.288	548.797.255	-8,78

Beban Perjalanan
Dinas
Rp.597.303.757,-

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas periode 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.597.303.757,- dan Rp. 1.065.099.699,- Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk periode 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas periode 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2024	2023	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	465.582.958	680.119.393	-31,54
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	17.870.000	146.775.000	-87,82
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	113.850.799	238.205.306	-52,20
	0	0	0,00
Jumlah	597.303.757	1.065.099.699	-43,92

Beban Barang
untuk Diserahkan
kepada
Masyarakat
Rp0.00

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat periode 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,- Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan

pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2016. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
periode 31 Desember 2024 dan 2023*

URAIAN JENIS BEBAN	2024	2023	NAIK (TURUN) %
Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	-	-
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	-	-
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	-	-
Jumlah	0	-	-

*Beban Bantuan
Sosial Rp.0,-*

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial periode 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk Periode 30 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial periode 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	2024	2023	% NAIK (TURUN)
Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	0	-	-
Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial	0	-	-
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	0	-	-
Jumlah	0	-	-

Beban

Penyusutan dan
Amortisasi Rp.
638.543.786,-

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.638.543.786,- dan Rp.782.594.577,-. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
periode 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	31 Desember 2024	2023	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	416.516.169	549.082.650	-31,83
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	222.027.617	233.511.927	-5,17
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	-	-	0,00
Beban Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional Pemerintah	-	-	0,00
Beban Penyusutan Jaringan	-	-	-
Jumlah Penyusutan	638.543.786	782.594.577	-22,56
			0,00
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	-	0,00
Beban Penyusutan aset lain-lain	-	-	0,00
Jumlah Amortisasi	-	-	0,00
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	638.543.786	782.594.577	-22,56

Uraian Beban penyusutan dan Amortisasi diatas terdiri dari :

2. Akumulasi penyusutan peralatan dan Mesin (penyusutan Reguler Semesteran)
Sebesar Rp. 416.516.169,-;
3. Akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan (penyusutan Reguler semesteran)
sebesar Rp. 222.027.617,-;
4. Akumulasi Penyusutan Jalan,irigasi dan Jaringan (penyusutan Reguler semesteran)
sebesar Rp. 0,-
5. Akumulasi Penyusutan Jaringan (penyusutan Reguler semesteran) sebesar Rp. 0,-

Beban Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih Rp. 0,-

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode 31 desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.12.600,-, Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Periode 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2024	2023	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jk Pendek	0	0	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	0	12.600	0,00
Jumlah	0	0	0,00

Beban Lain-lain
Rp0.00

D.11. Beban Lain-lain

Jumlah Beban Lain-lain untuk periode 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0.00 dan Rp0.00. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Lain-lain periode 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2024	2023	NAIK (TURUN) %
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	0	0	-
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	0	0	-
Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya	0	0	-
Jumlah	0	0	-

Surplus /Defisit
dari Kegiatan Non
Operasional Rp0

D.12 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional periode 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional periode 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN	31 Desember 2024	2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Kegiatan non Operasional lainnya	0	0	
Beban dari Kegiatan non Operasional lainnya	0	0	-
Jumlah Surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya	0		
Penjualan Alat Kantor	0	-	-
Jumlah surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional lainnya	0	0	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		0	
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	0	0	-

Pos Luar Biasa
Rp0,00

D.13 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa periode 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN	31-Dec-24	2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan PNB	0	-	-
Beban Perjalanan Dinas	0	-	-
Beban Persediaan	0	-	-
Jumlah	0	-	-

E . PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal Rp.
21.680.710.548,-*

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal periode 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.21.680.710.548,- dan . Rp. 21.619.212.899,-

*Defisit LO
Rp.(7.250.544.041)*

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada periode 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp.(7.250.544.041,-) dan Rp.(10.231.038.997,-) Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Penyesuaian Nilai
Aset Rp.0.*

E.3 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

*Koreksi Nilai
Persediaan Rp.0,-*

E.4 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp. 0- Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk periode 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Koreksi
Barang Konsumsi	-
Bahan Untuk Pemeliharaan	-
Pita Cukai,Materai dan Leges	-
Bahan Baku	-
Jumlah	-

Selisih Revaluasi

Aset Tetap Rp.0,-

E.5 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-.

Koreksi Aset Tetap

Non Revaluasi

Rp.0,-

E.6 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp.0- dan .Rp.0,- Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Periode 31 Desember 2024

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Peralatan dan Mesin	-
Gedung dan Bangunan	-
Jumlah	-

Koreksi Lain-Lain

Rp. 38.700,-

E.7 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp.38.700,- dan Rp.5.193.900,-. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

Rincian Koreksi Lain-lain

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Koreksi Beban	-
Koreksi Pendapatan	-
Koreksi Piutang	38.700
Koreksi Kewajiban	-
Koreksi Hibah	-
Jumlah	38.700

Transaksi Atas
Entitas Rp.
4.887.412.591,-

E.7 Transaksi Atas Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.4.887.412.591,- dan Rp. 10.293.908.920,-. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	583.505.000
Ditagihkan ke Entitas Lain	(7.099.573.801)
Transfer Masuk	(10.577.515)
Transfer Keluar	1.639.233.725
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	(4.887.412.591)

E.7.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2024, DDEL sebesar Rp. 583.505.000,- sedangkan DKEL sebesar Rp.(7.099.573.801),-

E.7.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp.10.577.515,-, Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp.1.639.233.725,-

Rincian Transfer Masuk TA. 2024

No	Jenis	Entitas Asal	Total
1	Sertifikat	BPPMHKP	10.536.375
2	Sertifikat	Stasiun KIPM Merak	41.140
3			-
4			-
5			-
	Jumlah		10.577.515

Rincian Transfer Keluar TA. 2024

No	Jenis	Entitas Asal	Entitas Tujuan	Total
1	Tanah dan Bangunan serta Selain Tanah dan Bangunan	Balai KIPM Lampung	BKHIT Lampung	1.639.233.725
3				-
4				-
5				-
	Jumlah			1.639.233.725

E.7.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp.0-. dari total Rp.0,- yang diterima sepanjang 31 Desember 2024.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 adalah Rp.0,-.

Rincian pengesahan Hibah untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
1			Rp -
2			Rp -
Total Pengesahan			Rp -
Pengesahan Pengembalian Hibah			Rp -
Jumlah			Rp -

Rincian Penerimaan Hibah Langsung 31 Desember 2024 disajikan pada lampiran.

Ekuitas Akhir

Rp.

19.273.234.624

E.8 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada periode 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 19.273.234.624,- dan Rp.21.636.327.374,-

F . PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak ada kejadian-kejadian penting yang menyebabkan perubahan setelah tanggal neraca di laporkan,-

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Rekening Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil PerikananLampung Terdapat pada Bank BNI Persero Cabang Pelabuhan Panjang dengan nama BPg017 Balai KIPM Lampung dengan Nomor 9890456496151000. Daftar Rekening Pemerintah

1. Utang Kepada Pihak Ketiga sebesar Rp.32.847.566,- Terdiri dari

- Belanja Pegawai Berupa Uang Makan PNS Bulan Desember 2024 sebesar Rp. 16.078.000,-.
- Belanja Pegawai Berupa Uang Makan PPPK bulan Desember 2024 sebesar Rp.592.000,-.
- Belanja Langganan Listrik Bulan Desember 2024 sebear Rp. 15.794.616,-
- Belanja Langganan Telepon Bulan Desember 2023 sebesar Rp. 382.950,-

2. Belanja Dibayar dimuka sebesar Rp.7.500.000.

- Belanja Sewa Gudang Arsip sebesar Rp.7.500.000 untuk 2 bulan dengan perjanjian kontrak Nomor : 32/BKIPM.LPG/PL.420/III/2024 dengan jangka waktu

sewa 1 Tahun mulai tanggal 1 Maret 2024 – 1 Maret 2025 dengan nilai sewa untuk 1 Tahun sebesar Rp. 45.000.000,-

3. Pengembalian Belanja Pegawai an. Dodo Firmansyah berupa Tunjangan Fungsional Tahun 2023 sebesar Rp. 7.740.000,-

4. Capaian Output

Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total
		Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output	
Balai KIPM Lampung	Nilai	100	61,72	98,11	100	100	100	100	93,88
	Bobot	10	15	20	10	10	10	25	
	Nilai Akhir	10,00	9,26	19,62	10,00	10,00	10,00	25,00	
	Nilai Aspek	80,86		99,53				100	



LAMPIRAN

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
ESELON I : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
WILAYAH/PROVINSI : (1200) LAMPUNG
SATUAN KERJA : (649615) BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN LAMPUNG

Tgl Data : 02/05/25 2:32 AM
Tgl Cetak : 02/05/25 9:08 AM
Halaman : 1
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	575,765,000	1,421,320,000	(845,555,000)	(59.491)
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	575,765,000	1,421,320,000	(845,555,000)	(59.491)
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	575,765,000	1,421,320,000	(845,555,000)	(59.491)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	4,522,583,463	6,507,933,037	(1,985,349,574)	(30.507)
Beban Persediaan	175,871,689	339,362,172	(163,490,483)	(48.176)
Beban Barang dan Jasa	1,391,396,058	2,408,589,411	(1,017,193,353)	(42.232)
Beban Pemeliharaan	500,610,288	548,797,256	(48,186,968)	(8.78)
Beban Perjalanan Dinas	597,303,757	1,065,099,699	(467,795,942)	(43.92)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
ESELON I : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
WILAYAH/PROVINSI : (1200) LAMPUNG
SATUAN KERJA : (649615) BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN LAMPUNG

Tgl Data : 02/05/25 2:32 AM

Tgl Cetak : 02/05/25 9:08 AM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	638,543,786	782,594,577	(144,050,791)	(18.407)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	12,600	(12,600)	(100)
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	7,826,309,041	11,652,388,752	(3,826,079,711)	(32.835)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(7,250,544,041)	(10,231,068,752)	2,980,524,711	(29.132)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	4,231,055	(4,231,055)	(100)
Pendapatan Pelepasan Aset	0	6,205,555	(6,205,555)	(100)
Beban Pelepasan Aset	0	1,974,500	(1,974,500)	(100)
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	(4,201,300)	4,201,300	(100)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	2,003,850	(2,003,850)	(100)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	6,205,150	(6,205,150)	(100)
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	29,755	(29,755)	(100)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(7,250,544,041)	(10,231,038,997)	2,980,494,956	(29.132)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(7,250,544,041)	(10,231,038,997)	2,980,494,956	(29.132)

Keterangan :
FINAL

BANDAR LAMPUNG, 2 Mei 2025
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Ashari Syarief.S.Pi.,M.P
Pembina Tk.I/IVb 196905151995031002

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (1200) LAMPUNG

SATUAN KERJA : (649615) BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN LAMPUNG

Tgl Data : 02/05/25 6:26 AM

Tgl Cetak : 02/05/25 9:28 AM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	21,636,327,374	21,568,263,551	68,063,823	0.32
SURPLUS/DEFISIT-LO	(7,250,544,041)	(10,231,038,997)	2,980,494,956	(29.13)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	38,700	5,193,900	(5,155,200)	(99.25)
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	0
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	0
LAIN-LAIN	38,700	5,193,900	(5,155,200)	(99.25)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	4,887,412,591	10,293,908,920	(5,406,496,329)	(52.52)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(2,363,092,750)	68,063,823	(2,431,156,573)	(3,571.88)
EKUITAS AKHIR	19,273,234,624	21,636,327,374	(2,363,092,750)	(10.92)

Keterangan :

FINAL

BANDAR LAMPUNG, 2 Mei 2025

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Ashari Syarief.S.Pi.,M.P

Pembina Tk.I/IVb 196905151995031002

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 032
ESELON I : BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN 13
SATUAN KERJA : BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN LAMPUNG 649615

Tgl Data : 02/05/25 2:32 AM
Tgl Cetak : 02/05/25 9:28 AM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	1,150,000,000	583,505,000	(566,495,000)	50.74	1,100,000,000	1,429,529,405	329,529,405	129.96
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	1,150,000,000	583,505,000	(566,495,000)	50.74	1,100,000,000	1,429,529,405	329,529,405	129.96
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	1,150,000,000	583,505,000	(566,495,000)	50.74	1,100,000,000	1,429,529,405	329,529,405	129.96
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	7,298,494,000	7,099,573,801	(198,920,199)	97.27	12,212,630,000	11,714,414,225	(498,215,775)	95.92
1. Belanja Pegawai	4,578,669,000	4,524,009,463	(54,659,537)	98.81	6,690,276,000	6,517,153,037	(173,122,963)	97.41
2. Belanja Barang	2,719,825,000	2,575,564,338	(144,260,662)	94.70	4,719,217,000	4,394,480,188	(324,736,812)	93.12
3. Belanja Modal	0	0	0	0	803,137,000	802,781,000	(356,000)	99.96
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 032
ESELON I : BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN 13
SATUAN KERJA : BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN LAMPUNG 649615

Tgl Data : 02/05/25 2:32 AM
Tgl Cetak : 02/05/25 9:28 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	7,298,494,000	7,099,573,801	(198,920,199)	97.27	12,212,630,000	11,714,414,225	(498,215,775)	95.92
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

BANDAR LAMPUNG, 2 Mei 2025
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Ashari Syarief.S.Pi.,M.P
Pembina Tk.I/IVb 196905151995031002

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORGANISASI : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
WILAYAH/PROVINSI : (1200) LAMPUNG
SATUAN KERJA : (649615) BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN LAMPUNG

Tgl Data : 02/05/25 2:32 AM
Tgl Cetak : 02/05/25 9:29 AM
Halaman : 1
lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	7,500,000	7,500,000	0	0.00
Piutang Bukan Pajak	0	7,740,000	(7,740,000)	(100.00)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	0	(38,700)	38,700	(100.00)
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	0	7,701,300	(7,701,300)	(100.00)
Persediaan	43,826,254	132,975,801	(89,149,547)	(67.04)
JUMLAH ASET LANCAR	51,326,254	148,177,101	(96,850,847)	(65.36)
ASET TETAP				
Tanah	9,349,011,000	10,143,396,960	(794,385,960)	(7.83)
Peralatan dan Mesin	8,184,366,928	9,248,347,533	(1,063,980,605)	(11.50)
Gedung dan Bangunan	10,509,425,550	11,495,926,700	(986,501,150)	(8.58)
Aset Tetap Lainnya	0	15,833,350	(15,833,350)	(100.00)
AKUMULASI PENYUSUTAN	(8,788,047,542)	(9,370,971,096)	582,923,554	(6.22)
JUMLAH ASET TETAP	19,254,755,936	21,532,533,447	(2,277,777,511)	(10.58)
JUMLAH ASET	19,306,082,190	21,680,710,548	(2,374,628,358)	(10.95)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	32,847,566	44,383,174	(11,535,608)	(25.99)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	32,847,566	44,383,174	(11,535,608)	(25.99)
JUMLAH KEWAJIBAN	32,847,566	44,383,174	(11,535,608)	(25.99)
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	19,273,234,624	21,636,327,374	(2,363,092,750)	(10.92)
JUMLAH EKUITAS	19,273,234,624	21,636,327,374	(2,363,092,750)	(10.92)
JUMLAH EKUITAS	19,273,234,624	21,636,327,374	(2,363,092,750)	(10.92)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	19,306,082,190	21,680,710,548	(2,374,628,358)	(10.95)

Keterangan :
FINAL

BANDAR LAMPUNG, 2 Mei 2025
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Ashari Syarief.S.Pi.,M.P
Pembina Tk.I/IVb 196905151995031002

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORGANISASI : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
WILAYAH/PROVINSI : (1200) LAMPUNG
SATUAN KERJA : (649615) BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN LAMPUNG
Tgl Data : 02/05/25 2:32 AM
Tgl Cetak : 02/05/25 9:30 AM
Halaman : 1
lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	114112	Belanja barang yang dibayar di muka (prepaid)	7,500,000	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	22,547,554	0
0.0	117114	Suku Cadang	21,278,700	0
0.0	131111	Tanah	9,349,011,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	8,184,366,928	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	10,509,425,550	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	7,022,209,242
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	1,765,838,300
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	16,670,000
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	16,177,566
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	7,099,573,801
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	583,505,000	0
0.0	313211	Transfer Keluar	1,639,233,725	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	10,577,515
0.0	391111	Ekuitas	0	21,636,327,374
0.0	391119	Koreksi Lainnya	0	38,700
3.0	425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	0	575,765,000
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	1,609,096,700	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	23,697	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	127,041,770	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	45,615,214	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	27,900,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	115,695,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	12,397,021	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	96,897,960	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	212,568,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	17,945,000	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	38,443,200	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	356	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	869,040	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	6,327,000	0
3.0	511633	Beban Tunjangan Umum PPPK	2,220,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	164,658,000	0
3.0	512212	Beban Uang Lembur PPPK	2,959,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	1,991,051,055	0
3.0	512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	50,875,450	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	460,609,308	0
3.0	521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	20,919,152	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (1200) LAMPUNG

SATUAN KERJA : (649615) BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN LAMPUNG

Tgl Data : 02/05/25 2:32 AM

Tgl Cetak : 02/05/25 9:30 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	78,623,500	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	6,600,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	54,021,750	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	4,896,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	89,754,000	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	203,930,498	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	2,962,600	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	66,879,250	0
3.0	522141	Beban Sewa	75,950,000	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	1,300,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	324,950,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	88,919,500	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	394,278,563	0
3.0	523131	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	4,650,000	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	465,582,958	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	17,870,000	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	113,850,799	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	416,516,169	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	222,027,617	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	175,871,689	0
3.0	593114	Beban Persediaan suku cadang	12,762,225	0
JUMLAH			38,143,177,498	38,143,177,498

Keterangan :
FINAL

BANDAR LAMPUNG, 2 Mei 2025
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Ashari Syarief.S.Pi.,M.P
Pembina Tk.I/IVb 196905151995031002

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORGANISASI : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
WILAYAH/PROVINSI : (1200) LAMPUNG
SATUAN KERJA : (649615) BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN LAMPUNG

Tgl Data : 02/05/25 6:26 AM
Tgl Cetak : 02/05/25 9:54 AM
Halaman : 1
lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	7,099,573,801
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	583,505,000	0
3.0	425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	0	575,765,000
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	7,740,000
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1,609,096,700	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	24,157	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	127,041,770	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	45,615,214	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	27,900,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	115,695,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	12,397,021	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	96,897,960	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	208,182,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	18,305,000	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	38,443,200	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	356	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	869,040	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	5,735,000	0
3.0	511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	2,220,000	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	171,062,000	0
3.0	512212	Belanja Uang Lembur PPPK	2,959,000	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	1,991,051,055	0
3.0	512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	50,875,450	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	460,609,308	0
3.0	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	20,919,152	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	78,623,500	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	6,600,000	0
3.0	521211	Belanja Bahan	54,021,750	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	4,896,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	89,754,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	88,906,852	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	210,882,416	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	4,393,400	0
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	68,606,140	0
3.0	522141	Belanja Sewa	75,950,000	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	1,300,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	324,950,000	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	88,919,500	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORGANISASI : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
WILAYAH/PROVINSI : (1200) LAMPUNG
SATUAN KERJA : (649615) BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN LAMPUNG

Tgl Data : 02/05/25 6:26 AM
Tgl Cetak : 02/05/25 9:54 AM
Halaman : 2
lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	394,278,563	0
3.0	523131	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	4,650,000	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	465,582,958	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	17,870,000	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	113,850,799	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	460
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	360,000
JUMLAH			7,683,439,261	7,683,439,261

Keterangan :
FINAL

BANDAR LAMPUNG, 2 Mei 2025
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Ashari Syarief.S.Pi.,M.P
196905151995031002

MEMO PENYESUAIAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

ESELON I : 13 BPPMHKP
WILAYAH : 0200 KANTOR DAERAH
KODE / URAIAN SATUAN KERJA : 649615 BALAI KIPM LAMPUNG
NO DOKUMEN : 001
TANGGAL/ PERIODE : 31 Desember 2024 / SEMESTER II TA 2024
TAHUN ANGGARAN : 2024

KATEGORI PENYESUAIAN

- | | | | | | |
|----|-------------------------------------|--------------------------------------|----|--------------------------|--|
| 1 | ☐ | Pendapatan Diterima Dimuka | 11 | ☐ | Koreksi Antar Beban |
| 2 | ☐ | Pendapatan yang Masih Harus Diterima | 12 | ☐ | Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi |
| 3 | ☐ | Beban Dibayar Dimuka | 13 | ☐ | Beban Selisih Kurs yang Belum Terealisasi |
| 4 | ☒ | Beban yang Masih Harus Dibayar | 14 | ☐ | Pembentukan Piutang Jangka Panjang |
| 5 | ☐ | Penyisihan Piutang | 15 | ☐ | Pelepasan Aset Tetap |
| 6 | ☐ | Penghapusan Piutang | 16 | ☐ | Pembentukan Piutang Jangka Pendek |
| 7 | ☐ | Penyusutan | 17 | ☐ | Transfer Masuk |
| 8 | ☐ | Kas Di Bandahara Penerimaan | 18 | ☐ | Transfer Keluar |
| 9 | ☐ | Kas Lainnya Di Bandahara Pengeluaran | 19 | ☐ | Reklasifikasi Neraca |
| 10 | ☐ | Persediaan | 20 | ☐ | Penyesuaian Lainnya |

PENYESUAIAN

NO	D/K	KODE AKUN	URAIAN AKUN	RUPIAH DEBIT	RUPIAH KREDIT
1	D	522111	Beban Langganan Listrik	15.794.616,00	
2	K	212112	Belanja Barang yang masih harus dibayar		15.794.616,00

URAIAN PENYESUAIAN

Belanja Layanan Listrik bulan Desember 2024 Balai KIPM Lampung

Dibuat oleh:
Retno Wulandari

31 Desember 20



Disetujui oleh :
Ashari Syarief, S.Pi.M.P

31 Desember 2024

Direkam oleh :
Dodi Purwanto

31 Desember 2024

MEMO PENYESUAIAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

ESELON I : 13 BPPMHKP
WILAYAH : 0200 KANTOR DAERAH
KODE / URAIAN SATUAN KERJA : 649615 BALAI KIPM LAMPUNG
NO DOKUMEN : 006
TANGGAL/ PERIODE : 31 Desember 2024 / SEMESTER II TA 2024
TAHUN ANGGARAN : 2024

KATEGORI PENYESUAIAN

- | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--|
| 1 ☐ | Pendapatan Diterima Dimuka | 11 ☐ | Koreksi Antar Beban |
| 2 ☐ | Pendapatan yang Masih Harus Diterima | 12 ☐ | Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi |
| 3 ☒ | Beban Dibayar Dimuka | 13 ☐ | Beban Selisih Kurs yang Belum Terealisasi |
| 4 ☐ | Beban yang Masih Harus Dibayar | 14 ☐ | Pembentukan Piutang Jangka Panjang |
| 5 ☐ | Penyisihan Piutang | 15 ☐ | Pelepasan Aset Tetap |
| 6 ☐ | Penghapusan Piutang | 16 ☐ | Pembentukan Piutang Jangka Pendek |
| 7 ☐ | Penyusutan | 17 ☐ | Transfer Masuk |
| 8 ☐ | Kas Di Bandahara Penerimaan | 18 ☐ | Transfer Keluar |
| 9 ☐ | Kas Lainnya Di Bandahara Pengeluaran | 19 ☐ | Reklasifikasi Neraca |
| 10 ☐ | Persediaan | 20 ☐ | Penyesuaian Lainnya |

PENYESUAIAN

NO	D/K	KODE AKUN	URAIAN AKUN	RUPIAH DEBIT	RUPIAH KREDIT
1	D	114112	Belanja Barang yang dibayar dimuka (prepaid)	7.500.000,00	
2	K	522141	Beban Sewa		7.500.000,00

URAIAN PENYESUAIAN

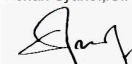
Belanja Sewa Gudang Arsip Balai KIPM Lampung TA 2024

Dibuat oleh:
Retno Wulandari


31 Desember 20



Disetujui oleh :
Ashari Syarief, S.Pi.M.P


31 Desember 2024

Direkam oleh :
Dodi Purwanto


31 Desember 2024

MEMO PENYESUAIAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

ESELON I : 03213 BPPMHKP
WILAYAH : 0200 KANTOR DAERAH
KODE / URAIAN SATUAN KERJA : 649615 BALAI KIPM LAMPUNG
NO DOKUMEN : 002
TANGGAL/ PERIODE : 31 Desember 2024 / SEMESTER II TA 2024
TAHUN ANGGARAN : 2024

KATEGORI PENYESUAIAN

- | | | | | | |
|----|-------------------------------------|--------------------------------------|----|--------------------------|--|
| 1 | ☐ | Pendapatan Diterima Dimuka | 11 | ☐ | Koreksi Antar Beban |
| 2 | ☐ | Pendapatan yang Masih Harus Diterima | 12 | ☐ | Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi |
| 3 | ☐ | Beban Dibayar Dimuka | 13 | ☐ | Beban Selisih Kurs yang Belum Terealisasi |
| 4 | ☒ | Beban yang Masih Harus Dibayar | 14 | ☐ | Pembentukan Piutang Jangka Panjang |
| 5 | ☐ | Penyisihan Piutang | 15 | ☐ | Pelepasan Aset Tetap |
| 6 | ☐ | Penghapusan Piutang | 16 | ☐ | Pembentukan Piutang Jangka Pendek |
| 7 | ☐ | Penyusutan | 17 | ☐ | Transfer Masuk |
| 8 | ☐ | Kas Di Bandahara Penerimaan | 18 | ☐ | Transfer Keluar |
| 9 | ☐ | Kas Lainnya Di Bandahara Pengeluaran | 19 | ☐ | Reklasifikasi Neraca |
| 10 | ☐ | Persediaan | 20 | ☐ | Penyesuaian Lainnya |

PENYESUAIAN

NO	D/K	KODE AKUN	URAIAN AKUN	RUPIAH DEBIT	RUPIAH KREDIT
1	D	522112	Beban Langganan telepon	382.950,00	
2	K	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar		382.950,00

URAIAN PENYESUAIAN

Beban langganan Telepon Bulan desember 2024

Dibuat oleh:
Retno Wulandari

31 Desember 20



Disetujui oleh :
Ashari Syarief, S.Pi.M.P

31 Desember 2024

Direkam oleh :
Dodi Purwanto

31 Desember 2024

MEMO PENYESUAIAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

ESELON I : 03213 BPPMHKP
WILAYAH : 0200 KANTOR DAERAH
KODE / URAIAN SATUAN KERJA : 649615 BALAI KIPM LAMPUNG
NO DOKUMEN : 003
TANGGAL/ PERIODE : 31 Desember 2024 / SEMESTER II TA 2024
TAHUN ANGGARAN : 2024

KATEGORI PENYESUAIAN

- | | | | | | |
|----|-------------------------------------|--------------------------------------|----|--------------------------|--|
| 1 | ☐ | Pendapatan Diterima Dimuka | 11 | ☐ | Koreksi Antar Beban |
| 2 | ☐ | Pendapatan yang Masih Harus Diterima | 12 | ☐ | Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi |
| 3 | ☐ | Beban Dibayar Dimuka | 13 | ☐ | Beban Selisih Kurs yang Belum Terealisasi |
| 4 | ☒ | Beban yang Masih Harus Dibayar | 14 | ☐ | Pembentukan Piutang Jangka Panjang |
| 5 | ☐ | Penyisihan Piutang | 15 | ☐ | Pelepasan Aset Tetap |
| 6 | ☐ | Penghapusan Piutang | 16 | ☐ | Pembentukan Piutang Jangka Pendek |
| 7 | ☐ | Penyusutan | 17 | ☐ | Transfer Masuk |
| 8 | ☐ | Kas Di Bandahara Penerimaan | 18 | ☐ | Transfer Keluar |
| 9 | ☐ | Kas Lainnya Di Bandahara Pengeluaran | 19 | ☐ | Reklasifikasi Neraca |
| 10 | ☐ | Persediaan | 20 | ☐ | Penyesuaian Lainnya |

PENYESUAIAN

NO	D/K	KODE AKUN	URAIAN AKUN	RUPIAH DEBIT	RUPIAH KREDIT
1	D	511129	Beban Uang Makan PNS	16.078.000,00	
2	K	212111	Belanja Pegawai yang masih harus dibayar		16.078.000,00

URAIAN PENYESUAIAN

Belanja Pegawai berupa Uang Makan Desember 2024 Balai KIPM Lampung

Dibuat oleh:
Retno Wulandari

31 Desember 20



Disetujui oleh :
Ashari Syarief, S.Pi.M.P

31 Desember 2024

Direkam oleh :
Dodi Purwanto

31 Desember 2024



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN LAMPUNG**

JL. SOEKARNO - HATTA NO. 91 KM.6 - 7, CAMPANG RAYA,
KEC. SUKABUMI - BANDAR LAMPUNG, TELEPON / FAX. 0721 - 770087
E-MAIL : lampung@bkipm.kkp.go.id, ski2lampung@yahoo.co.id

**BERITA ACARA SERAH TERIMA DOKUMEN KEPEMILIKAN
TANAH DAN BANGUNAN SERTA KENDARAAN BERMOTOR
Nomor : B.1700/BKIPM.LPG/PL.750/XI/2024**

Pada hari ini senin tanggal dua puluh lima bulan november tahun dua ribu dua puluh empat (25-11-2024), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Ashari Syarif, S.Pi., M.P : Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. drh. Donny Muksydayan, M.Si : Kepala Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Lampung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Secara bersama – sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Sebagai tindak lanjut atas Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara No.840/SJ/PL.450/X/2024 dan No.8892/PL.330/B/10/2024 **PARA PIHAK** telah sepakat mengadakan serah terima Dokumen kepemilikan Tanah dan Bangunan serta Kendaraan Bermotor sesuai lampiran dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima dengan baik Dokumen Kepemilikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara Serah Terima ini.

Pasal 2

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mengurus balik nama dokumen kepemilikan tersebut dari Kementerian Kelautan Dan Perikanan Menjadi Badan Karantina Indonesia.

Pasal 3

- (1) Dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima ini, maka seluruh Penatausahaan Dokumen kepemilikan beserta tanggung jawab penyimpanannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

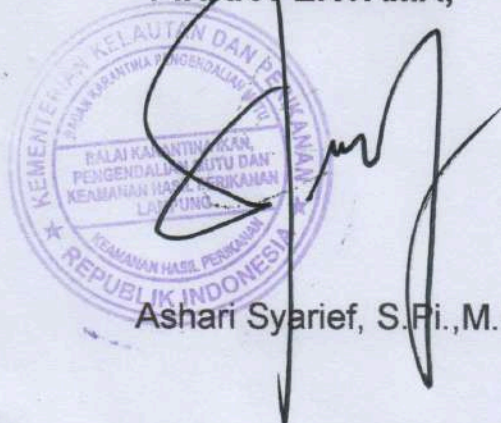
- (2) Berita Acara Serah Terima ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



drh. Donny Muksydayan, M.Si

PIHAK PERTAMA,



Ashari Syarief, S.Pi., M.P

Lampiran : Berita Acara Serah Terima Dokumen
Kepemilikan Tanah Bangunan Dan
Kendaraan
Nomor : B.1700/BKIPM.LPG/PL.750/XI/2024
Tanggal : 25 November 2024

No	Jenis Dokumen	No Dokumen	Jumah Dokumen
1.	Sertifikat Tanah Kantor Tarahan	08.02.05.13.4.00001	1 Berkas
2	Sertifikat Tanah Kantor Bakauheni	08.02.12.15.4.00001	1 Berkas
3.	Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Kantor Bakauheni	503/164/IV.7/VII/2013	1 Berkas
4.	Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Kantor Tarahan	503/162/IV.7/VII/2013	1 Berkas
5.	BPKB Sepeda Motor	F2860166F	1 Berkas
6.	BPKB Sepeda Motor	G0887069F	1 Berkas
7.	BPKB Sepeda Motor	G0887071F	1 Berkas
8.	BPKB Sepeda Motor	I-05746418F	1 Berkas
9.	BPKB Sepeda Motor	K-03876526	1 Berkas
10.	BPKB Sepeda Motor	L-04150944	1 Berkas



PIHAK KEDUA,

Donny Muksydayan, M.Si

PIHAK PERTAMA,

Ashari Syarief, S.Pi., M.P